

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH  
DAERAH  
(LAKIP)  
TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

---

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, Adapun penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini kita telah berupaya secara maksimal namun masih dirasakan kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pariaman, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**SUMARDI, S.Sos. MM**

NIP. 19690407 199003 1 006

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **76,15** dengan kategori BB dan interpretasi nilai SANGAT BAIK, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	24,60	30	25,50
2.	PENGUKURAN KINERJA	30	20,40	30	23,10
3.	PELAPORAN KINERJA	15	11,10	15	10,80
4.	EVALUASI INTERNAL	10	16,25	25	16,75
JUMLAH		100		100	
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			<b>72,35</b>		<b>76,15</b>
PREDIKAT			<b>BB (SANGAT BAIK)</b>		<b>BB (SANGAT BAIK)</b>

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,  
  
**HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19811226 199901 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Padang Pariaman
2. Arsip.

---

---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan .....	3
C. Kewenangan Dan Data Umum Organisasi.....	5
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dinas Perhubungan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis.....	8
B. Rencana Kinerja Tahun.....	9
B. Perjanjian Kinerja .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.....	12
BAB IV PENUTUP .....	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Langkah Kedepan.....	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Dinas Perhubungan .... 6

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis..... 9

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2024..... 10

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... 10

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024..... 11

Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024..... 12

Tabel 3. 1 Parameter Keberhasilan Capaian Kinerja ..... 12

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 ..... 1

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Tahun 2024..... 3

Tabel 3. 4 Klasifikasi Jalan Di Jalan Kabupaten Padang Pariaman ..... 3

Tabel 3. 5 JUMLAH KENDARAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN ..... 3

Tabel 3. 6 V/C Ratio Konektifitas Jalan Kolektor .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 7 V/C RATIO KONEKTIFITAS JALAN LOKAL ..... 4

Tabel 3. 8 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah ..... 6

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Tahun 2024 ..... 9

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 12 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah ..... 12

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024..... 16

Tabel 3. 14 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah ..... 17

Tabel 3. 15 Realisasi Kinerja Tahun 2024.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas ..... 23

Tabel 3. 17 Sarana dan Prasarana beserta Sumber Daya Manusia Pendukung ..... 23

Tabel 3. 18 Realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman ..... 23



---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2024.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). LAKIP Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pepres ini dijabarkan kedalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran yang objektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Laporan ini juga salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan.

### **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman no : 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman beralamat di jalan M. Syafei No. 10 Kota Pariaman. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok : Melaksanakan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada tahun 2024 Dinas Perhubungan didukung oleh 96 orang aparatur yang terdiri dari 25 orang PNS dan 71 orang pegawai Swakelola. Anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan tahun 2024 adalah sebesar Rp19.892.592.974,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 23.849.577.569,00 dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp 23.611.109.873,00

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman



Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, adalah:

**“PADANG PARIAMAN BERJAYA”**

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Unggul **Berkelanjutan**” memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. “**Religius**” adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. “**SeJAhtera**” merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. “**Berbudaya**” merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.



---

Dinas Perhubungan berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

### **C. Kewenangan Dan Data Umum Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan perencanaan bidang perhubungan.
2. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan.
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan.
4. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang perhubungan
5. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ ataupun tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Perhubungan dibangun dengan struktur yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Perkeretaapian
  - Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara
  - Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perkeretaapian
4. Bidang Keselamatan Teknik, Sarana dan Prasarana
  - Seksi Sarana dan Prasarana
  - Seksi Teknik Kendaraan Bermotor
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian Operasional
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

No.	Klasifikasi		Jumlah
	Komposisi Menurut Golongan		
I.	1.	Golongan IV	03
	2.	Golongan III	12
	3.	Golongan II	10
	JUMLAH		23
II.	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan		
	1.	Sarjana S2	04
	2.	Sarjana S1	28
	3.	Sarjana Muda / D3	04
	4.	SLTA	60
	JUMLAH		96

Selain pegawai yang dirinci diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh pegawai swakelola sebanyak 71 orang sehingga total jumlah aparatur yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 96 orang

#### D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dinas Perhubungan

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya sumberdaya Manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Dinas Perhubungan;
2. Minimnya ketersediaan SOP (Standar Operasional Prosedure) yang jelas;
3. Kurangnya rambu rambu lalu lintas;
4. Banyaknya perlintasan sebidang liar;
5. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana /fasilitas lalu lintas untuk keselamatan dan keamanan transportasi;
6. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
7. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan;
8. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi;
9. Belum Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan serta kelancaran transportasi;
10. Tingginya angka kecelakaan yang berada di daerah ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan daerah rawan kecelakaan lainnya (tanjakan, penurunan, tikungan);
11. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan;
12. Masih Rendahnya disiplin dalam berlalu lintas;



13. Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi;
14. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
15. Dalam aspek pelayanan angkutan antara lain belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
16. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi;
17. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
18. Fasilitas perlengkapan jalan belum sesuai dengan kebutuhannya, disebabkan belum adanya data base dan pemetaan lokasi yang tepat, seperti fasilitas perlengkapan jalan/rambu, Halte, Trotoar, Penerangan Jalan Umum, Terminal;
19. Kendaraan angkutan umum seperti angdes di padang pariaman, masih 50% yang mengurus Keur. Sehingga angkutan umum tersebut masih banyak yang tidak laik jalan, trayek tidak jelas, terminal tidak mendukung;

#### **E. Sistematika Pelaporan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Dalam Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kewenangan dan Data Umum Organisasi, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Penulisan.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

###### **A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perhubungan.

###### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perhubungan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

##### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini Menjelaskan Kesimpulan dan Tindak lanjut



---

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode Renstra Dinas Perhubungan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan (Renstra) Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupokasi) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2021-2026 mendukung misi ke 2 (Dua) yaitu “Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang”.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Adapun Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian sektor jasa;
2. Menyediakan infrastruktur yang memadai;
3. Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi;
4. Mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas;
5. Terwujudnya aparatur teknis yang handal dan profesional dibidang perhubungan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman untuk periode lima tahun sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa bidang transportasi;
2. Meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas;
3. Meningkatkan kelancaran lalu lintas;

4. Meningkatkan layanan angkutan umum yang berkualitas;
5. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan serta kelancaran transportasi;
6. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi;
7. Meningkatnya keamanan dan nyaman dalam berlalu lintas;
8. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
9. Sarana dan prasarana yang terpenuhi;
10. Jumlah Aparatur yang dilatih;
11. Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja OPD;
12. Persentase Laporan Tepat waktu Persentase Laporan Tepat waktu;
13. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa bidang transportasi ditandai dengan kontribusi sektor perhubungan terhadap PDRB. Untuk usaha transportasi;

Untuk mencapai kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024, Dinas Perhubungan Kab. Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2024, dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024. Target-target kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.

**Tabel 2. 1** Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Kualitas Infrastruktur yang Memadai	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51
		Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Berlalu Lintas	75	77	80	80	80
2.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan dari Inspektorat	80	80	83	84	85

## B. Rencana Kinerja Tahun

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024 :



Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Kualitas Infrastruktur yang Memadai	Persentase Perlengkapan Jalan yang Sesuai dengan Peruntukannya	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman	Rasio	0,51
		Penurunan tingkat kecelakaan Berlalu Lintas	Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Berlalu Lintas	%	80
2.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan dari Inspektorat	Nilai	85 (A)

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman	Rasio	0,51
	Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Berlalu Lintas	%	80
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan dari Inspektorat	Nilai	85 (A)

Paraf dan Stempel  
Kabupaten Padang Pariaman

DAFTAR KINERJA  
30/6-24 p 30/6-25 A 30/1-25 U



## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

Sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 - 2026 maka ditetapkan sasaran kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam tabel:

**Tabel 2. 4** Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman	0,51
2.	Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Berlalu Lintas	80%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	85 (A)

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.552.638.469	4.354.949.897
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.283.949.100	19.244.793.976



3.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	12.990.000	11.366.000
	Jumlah	23.849.577.569	23.611.109.873

**Tabel 2.**  
**5**  
Anggaran

dan Realisasi Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2024. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 3. 1** Parameter Keberhasilan Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010 dan Keputusan Kepala LAN 293 Th. 2003, diolah

#### 1. Capaian target dan realisasi kinerja tahun 2024 :



---

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 DISHUB Kabupaten Padang Pariaman memiliki beberapa sasaran strategis adapun capaian Kinerja DISHUB Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman	0,51	0,51	100	Sangat Tinggi	DISHUB
1.3.1.1	Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Berjalan Lintas	80	72	90	Tinggi	DISHUB
1.5.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	85	76,15	89,59	Tinggi	KemenP ANRB



**Sasaran 1:**  
**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi**

Sasaran 1 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan misi ke II, Dinas Perhubungan yaitu menciptakan kinerja Lalu Lintas Yang Aman Tertib dan Lancar, dengan indikator sarannya yaitu menekan angka kecelakaan lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan Undang Undang Lalu Lintas nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Keselamatan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan atau lingkungan.

Dalam Usaha meningkatkan keselamatan berlalu lintas dibutuhkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan lengkap antara lain :

1. Pemasangan Rambu Lalu Lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perundangan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan;
2. Pemasangan Marka suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong,



---

serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;

3. Pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum, terutama tempat-tempat yang rawan kecelakaan;
4. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) merupakan perangkat elektronik yang bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan;
5. Adapun program yang mendukung kegiatan kegiatan tersebut yaitu Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Dan Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dalam Mencapai sasaran Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas yang menjadi indikatornya antara lain : Menurunnya angka kecelakaan yang satuannya persentase.

1. Adapun Data kecelakaan lalu lintas Tahun 2024 dari Laka Lantas kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resort Padang Pariaman , dari bulan Januari sampai Desember 2024 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 284 kecelakaan, dan yang menjadi korban mati ditempat sebanyak 62 orang, dan luka berat sebanyak 0 orang serta yang mengalami luka ringan sebanyak 507 orang, dengan kerugian materil sebesar Rp. 456.950.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Jika dibandingkan dengan kecelakaan tahun sebelumnya (2023) dimana jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 363 kecelakaan, dan yang menjadi korban mati ditempat sebanyak 58 orang, luka berat 1 orang dan yang mengalami luka ringan 603 orang, dengan kerugian materil sebesar 842.300.100,00 (Delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu seratus rupiah). Kecelakaan yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 363 kecelakaan, sedangkan Tahun 2024 terjadi kecelakaan berjumlah 284 kecelakaan. Terjadi penurunan kecelakaan lalin sebanyak 79 kecelakaan. Begitu juga dengan korban dan kerugian material Menurun.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024

**Tabel 3. 3** Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024		Interpretasi
			Target	Realisasi	
1	2	3	6	7	8
01	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman	0,51	0,51	Berhasil

Berdasarkan Renstra Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 DISHUB Kabupaten Padang Pariaman memiliki Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Transportasi dengan indikator sasaran Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman, startegis tersebut kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai DISHUB

**Tabel 3. 4** Klasifikasi Jalan Di Jalan Kabupaten Padang Pariaman

NO	KLASIFIKASI JALAN	PANJANG JALAN (Km)
1.	Jalan Nasional	83,57
2.	Jalan Provinsi	95,77
3.	Jalan Kabupaten	2.072,4
<b>Total</b>		<b>2.251,74</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

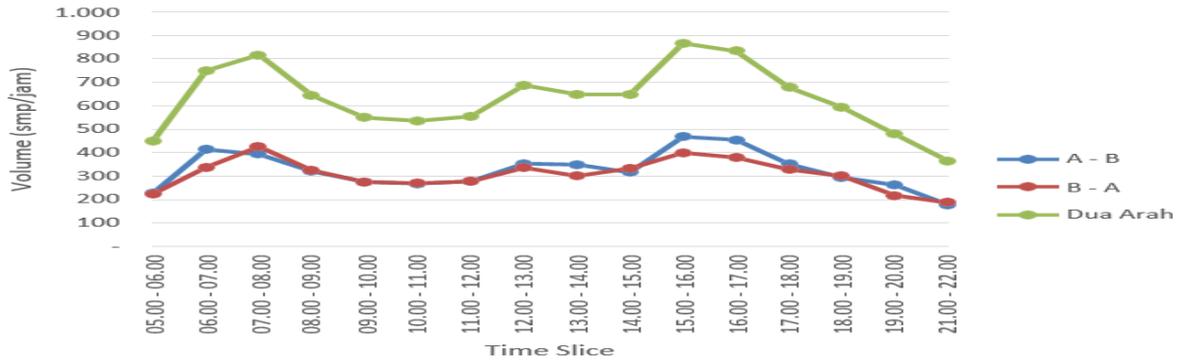
**Tabel 3. 5** JUMLAH KENDARAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	JUMLAH KENDARAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
1.	JumlahKendaraan Bermotor - Penumpang mobil Penumpang	1.096
2.	Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus	7.994
3.	Jumlah Kendaraan Pribadi	97.982
4.	Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk	3.072
<b>Total</b>		<b>110.144</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

**Gambar 3. 1** Grafik Fluktuasi Volume Lalu Lintas

**GRAFIK FLUKTUASI VOLUME LALU LINTAS**

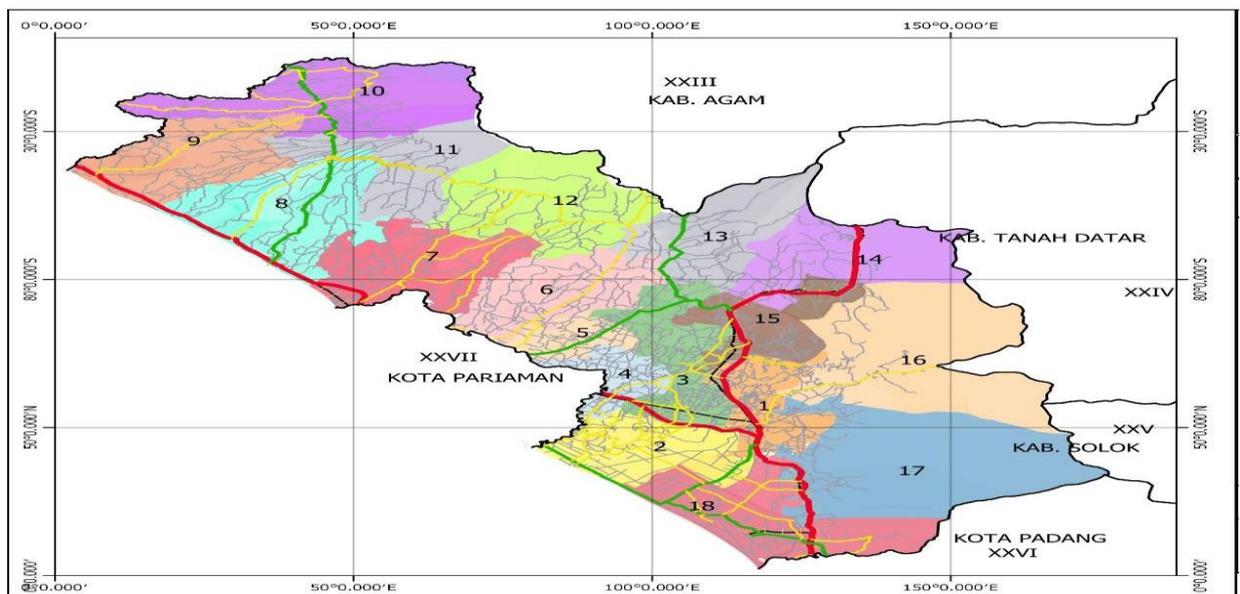


**Tabel 3. 6 RATIO KONEKTIFITAS JALAN LOKAL**

No	Node		Nama Jalan	Fungsi Jalan	V/C Ratio
	Awal	Akhir			
1	105	104	Jl. Balah hilir	Lokal	0,15
2	104	1601	Jl. Pasia laweh	Lokal	0,13
3	601	602	Jl. Raya ampalu-Padang Sago	Lokal	0,18
4	704	703	Jl. Malalak -Padang pariaman 1	Lokal	0,21

Sember : Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

**Gambar 3. 2 PETA JARINGAN JALAN KAB PADANG PARIAMAN**



Rasio Konektifitas Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah = 0,51 atau kurang dari 1 berarti lalu lintas pada jalan Kabupaten Padang Pariaman sesua dengan kapasitas jalan yang tersedia.



Rasio Konektifitas hampir mencapai target yang diharapkan dibandingkan dengan pada tahun 2022, beberapa factor penyebab kecelakaan antara lain :

1. Mechanical Failure (Kesalahan Teknis Kendaraan)

Faktor ini juga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan disebabkan kurangnya pengetahuan si pengendara terhadap kondisi kesiapan kendaraan yang akan digunakan.

2. Faktor kondisi jalanan.

Faktor kondisi jalanan yang bergelombang, berlobang, rusak sangat membahayakan bagi pengguna jalan raya.

3. Faktor Kondisi cuaca/alam

Kondisi cuaca yang buruk bisa membuat jarak pandang berkurang, jarak pengereman jadi jauh, kondisi jalanan menjadi licin.

3. Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan;

4. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut :

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.**

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis pertama pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2023 dan 2024 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.3 Capaian Kinerja DISHUB Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024		Interpretasi
				Target	Realisasi	
1	2	3	5	6	7	8
01	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman	0,49	0,51	0,51	Berhasil



c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah

Perbandingan anatara realisasi pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada sasaran strategis pertama BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah				Realisasi s/d th ini (2024) / target Akhir Jangka Menengah (2026) %	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman	Rasio	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,45	0,50	0,51	0,51	100	Berhasil

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

1. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Penyebab keberhasilan :

1. Komitmen dari seluruh petugas yang ada dilapangan.
2. Tersedian fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya.
3. Tersedianya tenaga pengawas/petugas di lapangan

Solusi yang telah dilakukan dengan melaksanakan sosialiasi dan penyuluhan penyuluhan pada sekolah sekolah dan masyarakat, agar bagi pengendara wajib berhati hati hati dalam mengendarai kendaraan. Menjaga kondisi fisik tubuh, dan memperhatikan kesiapan kendaraan.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Berdasarkan analisis cara mengendalikan resiko kecelakaan dijalan raya antara lain

1. Biasakan berkendara berada disatu jalur, jangan berpindah pindah jalur;
2. Antisipasi pengemudi yang memiliki sikap suka berpindah jalur;
3. Jika ingin pindah jalur ikuti prosedur yang aman untuk berpindah;
4. Jangan Lawan arus;

---

5. Mengemudilah sesuai kondisi jalan raya dan kesehatan diri sendiri.

**e. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Adapun yang mendukung program dan kegiatan:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Dengan Kegiatan :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota selama 1 (satu) tahun;
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota selama 1 (satu) tahun;
3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota selama 1 (satu) tahun;
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota selama 1 (satu) tahun;
5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan selama 1 (satu) tahun.

**F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja DISHUB pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran di bagian Sekretariat, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 96,95 = 3,05\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 3,05 = 3,05\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 sebesar 3,05 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman	100%	96,95%	3,05%



**Sasaran 2: Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas**

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024**

Pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas terdapat sebuah indikator yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Berlalu Lintas. Adapun capaian kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Dalam Usaha meningkatkan keselamatan pada perlintas perkeretaapian diperlukan manajemen lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan dilakukan dengan peningkatan kapasitas jalan.



Dibutuhkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan lengkap antara lain : Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Pemasangan Marka, Adanya RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) Pemasangan Lampu Jalan Umum dan Petugas yang diturunkan pada titik titik yang belum memiliki palang pintu, Perlunya Sosialisasi dengan harapan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Adapun program yang mendukung kegiatan kegiatan tersebut yaitu Program Pengelolaan Perkeretaapian.

Dalam Mencapai sasaran Meningkatnya Kelancaran Berjalan Lintas yang menjadi indikatornya antara lain : Kecepatan rata rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk. Dalam rangka meningkatnya kelancaran lalu lintas di Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama Tahun 2024. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan Pada Dinas Perhubungan seperti : program peningkatan pelayanan angkutan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

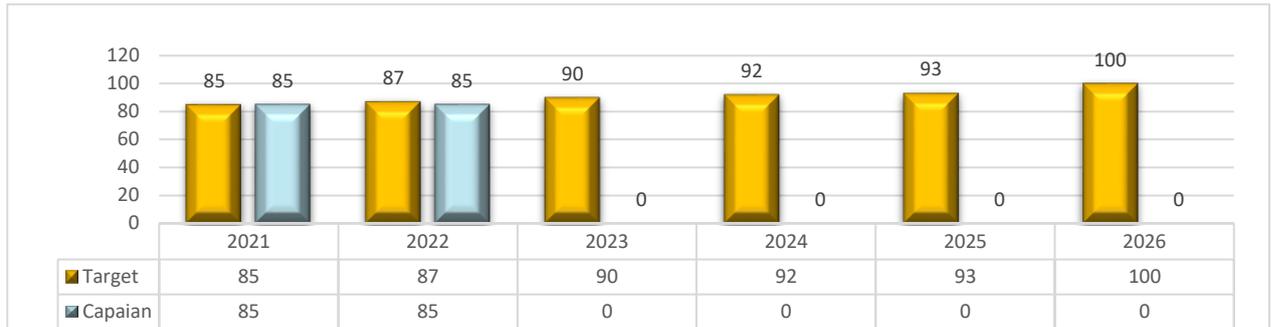
**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.**

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis DISHUB Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2023 dan 2024 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini;

**Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Berjalan Lintas	%	75	80	80	100	Tercapai

**Gambar 3. 3** Grafik Capaian Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi

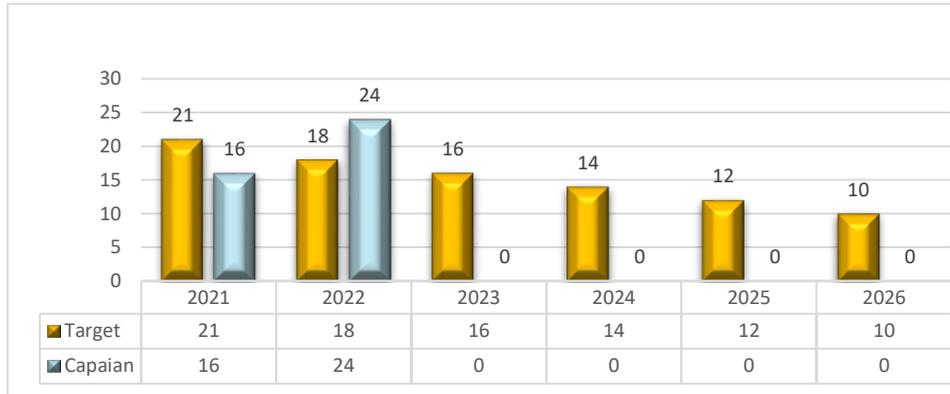


**Gambar 3. 4** Dokumentasi Kegiatan



**MENINGKATNYA KESELAMATAN BERLALU LINTAS**

**Gambar 3. 5** Grafik Capaian Meningkatkan Keselamatan Berjalan Lintas



**Gambar 3. 6** Dokumentasi Meningkatkan Keselamatan Berjalan Lintas



Jumlah rambu-rambu yang terpasang bila dibandingkan antara antara target dan realisasi kinerja tahun ini hasilnya 80%. Artinya target yang ditetapkan dapat terealisasi. Jika kita bandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah**

Perbandingan antara realisasi sasaran strategis pada jangka menengah DISHUB dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada DISHUB Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 7** Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah				Realisasi sd th ini (2024) / target Akhir Jangka Menengah (2026) %	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Berjalan Lintas	%	75	77	80	80	80	77	80	80	80	100 %	Berhasil

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi sasaran strategis pada jangka menengah; Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative. Adapun penyebab keberhasilan :

1. Eksis jalan yang memadai didukung dengan rambu rambu jalan;

---

2. Klasifikasi jalan yang baik, ditambah dengan pengawasan petugas di jalan;

Penyebab kegagalan adalah:

1. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi yang digunakan di jalan membuat beban jaringan jalan menjadi makin berat. Angka kepemilikan kendaraan yang tinggi ini mengakibatkan permasalahan parkir;
2. Jalan yang tidak memadai dan perlengkapan fasilitas jalan yang kurang;
3. Kurangnya pengawasan petugas di jalan.

Solusi yang dilakukan :

1. Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu rambu, cermin tikung dll;
2. Menambah petugas di jalan jalan rawan titik kemacetan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran kecepatan rata rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk. Adapun dokumen pendukung dan data sebagai berikut : Pelaksanaan dengan sistem pendataan Sumber daya manusia yang mendukung dalam pencapaian target tersebut masih rendah dan kurang berkompeten, sehingga perlu ditambah dengan pendidikan teknis. Pada Dinas Perhubungan ada 71 tenaga swakelola yang masih muda dan cakap dapat diberdayakan dalam mencapai kinerja dimaksud dalam mencapai tujuan dinas perhubungan. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, survey aktifitas sarana angkutan yang bergerak dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman baik dilokasi titik pendataan maupun pada titik aktifitas angkutan, serta data yang tersedia.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran kecepatan rata rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Adapun dokumen pendukung dan data adalah Pelaksanaan dengan sistem pendataan, survey aktifitas sarana angkutan yang bergerak dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman baik dilokasi titik pendataan maupun pada titik aktifitas angkutan, serta data yang tersedia.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**



Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 119$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 119 - 100 = 19\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang sasaran ini, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 95,44 = 4,56\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 19 + 4,56 = 23,56\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 sebesar 23,56%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Meningkatnya Keselamatan Ber Lalu Lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Ber Lalu Lintas	100%	95,44%	23,56%
---	--	---	------	--------	--------



Sasaran 3:  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

#### A. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Sedangkan SAKIP merupakan merupakan sebuah sistem pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. 1) Evaluasi terhadap Tingkat pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi, sementara lebar jalan nyaris tak berubah, membuat daerah kesulitan dalam mengakomodir pertumbuhan tersebut. Penerapan SAKIP dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP, 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja, 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilakukan melalui 2 tahap yaitu melalui evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Komponen yang dinilai dalam evaluasi yaitu Perencanaan kinerja dengan bobot 30, Pengukuran kinerja dengan bobot 30, pelaporan kinerja dengan bobot 15, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25. Penentuan penilaian kepada 4 komponen tersebut ditentukan oleh 3 aspek yaitu keberadaan 20%, kualitas 30%, dan pemanfaatan 50%. Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/190/AA.05/2024 tentang Hasil

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dijelaskan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa nilai sebesar 69,19 dengan Predikat “B” yang berarti “Baik.

Target Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, B bila dibandingkan dengan target 2022 sebesar BB jadi ada peningkatan. Target dan realisasi telah terpenuhi (sesuai dengan yang diharapkan).

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2024**

**Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		%	Interpretasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9
01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Huruf	A (85)	BB (76,15)	89,59	Tinggi

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.**

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis pertama pada DISHUB Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2023 dan 2024 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini

**Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Huruf	BB	A (85)	BB (76,15)	89,59	Tinggi

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah**

Perbandingan anantara realisasi pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada sasaran strategis pertama BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah				Realisasi sd th ini (2024) / target Akhir Jangka Menengah (2026)	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Angka	A	A	A	A	AA	B	BB	BB	BB	BB (76,15)	Tinggi

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DISHUB telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan dengan meningkatkan nilai SAKIP DISHUB Kab. Padang Pariaman. Adapun Indikator Pada sasaran pertama ini adalah Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dnas Perhubungan dari Inspektorat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Analisis penyebab keberhasilan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar antara lain:

1. Tidak terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
2. Belum setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
3. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
4. Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
5. Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



---

Analisis penyebab kegagalan :

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Solusi yang telah dilakukan :

1. Menata ulang trayek angkot ( angkutan umum);
2. Membenahi angkutan umum;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

**e. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan memiliki sebuah indikator yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat. Dalam upaya meningkatkan hasil penilaian Evaluasi SAKIP DISHUB Kab. Padang Pariaman didukung oleh program Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan pendukung dalam pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan yaitu:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.

- Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen Renja 2024, Renja Perubahan 2024, RKA 2025, RKAP 2024, DPA 2024, dan Perubahan DPA 2024 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat.

- b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan Laporan LPPD Tahun 2023, LAKIP 2023 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.



Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran di bagian Sekretariat, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 96,95 = 3,05\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 3,05 = 3,05\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 sebesar **3,05 %**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	100%	96,95%	3,05%

Penanggulangan Bencana Daerah				
----------------------------------	--	--	--	--

**Gambar 3. 7** Evaluasi Bupati Bersama Pejabat Eselon II



**Gambar 3. 8** Evaluasi Eselon II Bersama Eselon III Dan IV



### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan**

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan ,masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala .

Hal ini tentunya berpengaruh kepada sasaran atau target yang ingin dicapai sehingga belum bisa maksimal, sehingga permasalahan-permasalahan ini perlu mengalami penanganan yang baik. Identifikasi permasalahan pada urusan Perhubungan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir yang selanjutnya menjadi isu strategis bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya.



- 
- I. Untuk itu, kondisi infrastruktur jalan yang baik tersebut perlu didukung dengan kelengkapan fasilitas /prasarana keselamatan lalu lintas seperti rambu, marka, delineator, guardrail, traffic light, cermin tikungan serta fasilitas lalu lintas lainnya sebagai pedoman, penuntun dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Di Padang Pariaman sebelumnya ada 3 terminal angkutan orang untuk tahun 2019. Adapun yang angkutan pedesaan di sebanyak 395 unit untuk tahun 2020 yang mengurus izin sebanyak 17 kendaraan. Yang melayani 07 trayek.

- II. Pemasalahan lalu lintas angkutan jalan antara lain :

- 1.) Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- 2.) Belum memadainya kualitas pelayanan Transportasi angkutan umum
- 3.) Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi
- 4.) Dalam aspek pelayanan angkutan antara lain belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan.
- 5.) Rendahnya disiplin berlalu lintas.
- 6.) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi
- 7.) Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi
- 8.) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
- 9.) Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana /fasilitas lalu lintas untuk keselamatan dan keamanan transportasi.
- 10.) Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
- 11.) Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan
- 12.) Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan

- 13.) Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**Tabel 3. 11** Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya tingkat disiplin pegawai	kurangnya tingkat disiplin pegawai	Kurangnya Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas dan Kinerjanya
2.	Masih lemahnya pengawasan dan evaluasi untuk kinerja pegawai	Kurang optimalnya evaluasi dan pengawasan untuk Kinerja Pegawai	belum optimalnya evaluasi dan pengawasan untuk Kinerja Pegawai
3.	Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang Perhubungan	masih rendahnya SDM pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang Perhubungan	belum optimalnya kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM khususnya tenaga Perhubungan Kurangnya Tersedianya Tenaga Ahli Bidang Perhubungan Belum Tersedianya Tenaga Ahli Pengujian untuk Perhubungan
4.	Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.	Kurangnya Kesadaran penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.	Belum adanya Kesadaran penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
5.	Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum	Kurang memadainya kualitas pelayanan angkutan umum	Belum adanya pelayanan angkutan umum yang memadai

**Tabel 3. 12** Sarana dan Prasana beserta Sumber Daya Manusia Pendukung

Sarana prasarana	Sumber daya Manusia	Sumber Dana
Alat tulis kantor Lap top/ computer Kend Operasional Jutnis/jutlak SPK ( Kontrak) Perda, Perbup, SK	Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor.  Staf yang trampil dan berkompeten	APBD Kabupaten Padang Pariaman .

**Tabel 3. 13** Realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran ( Rp)	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan		( Rp)	%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>2.116.482.672,00</b>	<b>1.742.576.327,00</b>	<b>82,33</b>



<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>87,5</b>	<b>dok</b>	<b>85.553.822,00</b>	<b>46.338.400,00</b>	<b>54,16</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4	80	dok	49.234.400,00	20.532.000,00	41,7
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>236.568.800,00</b>	<b>136.586.316,00</b>	<b>57,74</b>
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	1	0	0	Dok	4.400.000,00	0,00	0
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	0	0	Unit	9.999.850,00	0,00	0
<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>						<b>19.046.368.132,00</b>	<b>18.664.676.835,00</b>	<b>98</b>
<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>90</b>	<b>85</b>	<b>94,4</b>	<b>%</b>	<b>18.809.320.502,00</b>	<b>18.517.234.135,00</b>	<b>98,45</b>
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota	50	35	70	unit	203.795.000,00	199.891.780,00	98,08
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	50	20	40	unit	18.484.355.572,00	18.197.719.465,00	98,45
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	50	23	46	unit	121.169.930,00	119.622.890,00	98,72
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		<b>90</b>	<b>88</b>	<b>97,7</b>	<b>%</b>	<b>100.028.490,00</b>	<b>76.464.750,00</b>	<b>76,44</b>
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	0	0	unit	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>		<b>90</b>	<b>80</b>	<b>88,8</b>	<b>%</b>	<b>17.261.200,00</b>	<b>3.072.350,00</b>	<b>17,8</b>
1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1	0	0	Lap	2.485.000,00	0,00	0
<b>Program Pengelolaan Perkeretaapian</b>						<b>27.980.700,00</b>	<b>8.365.000,00</b>	<b>29,89</b>
<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>		<b>12</b>	<b>16</b>	<b>133</b>	<b>angka</b>	<b>18.946.800,00</b>	<b>3.786.850,00</b>	<b>19,99</b>
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	4	1	25	%	18.946.800,00	3.786.850,00	19,9
<b>JUMLAH</b>						<b>18.898.904.037,00</b>	<b>18.547.552.985,00</b>	<b>98,1</b>



---

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024 Dimana secara persentase realisasi anggaran belanja langsung Dinas Perhubungan pada tahun 2024 adalah sebesar 99,86%

---

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja. Beberapa hal yang bisa disimpulkan antara lain:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan secara optimal melalui peningkatan kinerja dimasing-masing bidang yang ada;
2. Capaian kinerja Dinas Perhubungan terhadap target RPJMD yang telah ditetapkan ada yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai target, namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya;
3. Realisasi indikator kontribusi sektor jasa transportasi terhadap PDRB Padang Pariaman.

Untuk tahun 2024 Dinas Perhubungan sudah membina dan mengikutsertakan siswa/siswi dalam lomba Siswa pelopor berlalu lintas dan lomba awak kendaraan angkutan umum ke tingkat Provinsi namun belum mendapatkan peringkat prestasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

### B. Langkah Kedepan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola Inspektorat Jenderal kedepan, perlu dibangun budaya kerja yang memiliki komitmen dan terstruktur terhadap penggunaan informasi dan teknologi.

#### 1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan hendaknya penyusunan rencana serta dokumen kinerja para pejabat struktural dan sasaran kinerja pegawai harus *in line* dan berkontribusi terhadap capaian dalam sasaran program dan indikator kinerja program Dinas Perhubungan.

#### 2. Pengukuran Kinerja

---

Penyampaian informasi kinerja hendaknya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan para pemangku kegiatan atau penanggung jawab kegiatan melakukan evaluasi secara periodik guna mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi capaian kinerja atau dilakukan revisi/penyesuaian sesuaidengan target yang optimis.

### **3. Pelaporan Kinerja**

Melakukan pembahasan intern sebelum disampaikannya laporan kinerja dan menjaga koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait format dan waktu pelaporan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel, relevan dan tepat waktu.

### **4. Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja hendaknya dilakukan secara periodik, begitupun dengan pelaksanaan monitoring rencana aksi dari hasil evaluasi tersebut. Penetapan target dan komitmen bersama dalam mengawal rencana aksi menjadi kunci dalam peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

### **5. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan terhadap *outcome* yang dicapai serta berkontribusi dalam mewujudkan sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran program Kementerian Perhubungan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Peningkatan keselamatan berlalu lintas melalui pelaksanaan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
2. Peningkatan kelancaran lalu lintas melalui program pelayanan angkutan;
3. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang berkualitas melalui program kelaikan pengoperasian kelaikan kendaraan bermotor;
4. Peningkatan prasarana transportasi yang sesuai standar melalui rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dan Perhubungan.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Perhubungan mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan



---

dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat maupun kepada stakeholders yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Tahun 2024 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Pariaman, 02 Januari 2025  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**SUHARDI, S.Sos. MM**

NIP. 19690407 199003 1 006



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARDI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR  
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SUHATRI BUR



  
SUHARDI, S.Sos, MM  
NIP. 19690407 199003 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERHUBUNGAN PADANG PARIAMAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Jalan di Kab. Padang Pariaman	0,51
2.	Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Berjalan Lintas	80%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.191.100.606	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.19.198.866.597	APBD
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rp. 14.550.000	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 24.404.517.203</b>	

Pariaman, 02 Januari 2025  
BUPATI PADANG PARIAMAN, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

SUHATRI BUR



SUHARDI, S.Sos, MM

NIP. 19690407 199003 1 006